

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA**

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Secara ringkas rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 954/161/SK/APBD/Dinsos/2016 dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016, tanggal 12 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan perencanaan strategis jangka menengah yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Renstra tersebut menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan program dengan strategi kebijakan dan rencana pengembangan yang terarah dan dapat diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

## 1. Pernyataan Visi Dan Misi

Pembangunan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat yang merupakan bagian dari Pembangunan Nasional bidang kesejahteraan sosial secara nasional telah menunjukkan banyak kemajuan bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang lebih dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Perubahan kondisi sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke arah yang lebih baik seperti tercermin pada indikator sosial antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah angka PMKS dan masyarakat miskin di sisi lain, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, juga tercermin pada meningkatnya fungsi dan kemandirian kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial masyarakat (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat Sumatera Barat.

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat, melalui pelayanan sosial yang panjang, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan identifikasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang strategis, yakni kemiskinan (atau kefakirmiskinan), keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan korban bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial pada kurun waktu 5 tahun ke depan (2016–2021) dilaksanakan berdasarkan pada visi :

**“Terwujudnya Keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menuju Sumatera Barat yang Sejahtera “.** Visi ini mengandung makna bahwa manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya.

Sejahtera berarti aman, sentosa, makmur dan bebas dari ancaman serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial, pengetahuan, keterampilan dan manajemen berusaha kepada PMKS.
2. Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas pelaku pembangunan dibidang usaha kesejahteraan sosial melalui tanggung jawab sosial.
3. Mengembangkan Sistem Jaminan dan Perlindungan Sosial.

## **2. Tujuan Strategik**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan strategis yang hendak dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
3. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan.

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

<b>VISI:</b>		
<b>“ Terwujudnya keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menuju Sumatera Barat yang sejahtera “</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b>Misi 1:</b> Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha kesejahteraan sosial, pengetahuan, keterampilan dan manajemen berusaha kepada PMKS.	Meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  2. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
<b>Misi 2 :</b> Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas pelaku pembangunan dibidang usaha kesejahteraan sosial melalui tanggung jawab sosial	Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan	
<b>Misi 3 :</b> Mengembangkan Sistem Jaminan dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	

### 3. Sasaran Strategik, Indikator Kinerja dan Program

#### a. Sasaran Strategik

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas
- 2) Terwujudnya kualitas Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 3) Terwujudnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelatihan dan bimbingan teknis

- 4) Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan Kesejahteraan Sosial

**b. Indikator Kinerja**

Sasaran Strategik sebagaimana telah ditetapkan Memiliki Indikator Kinerja sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri : - Panti Pemerintah - Panti Swasta
	Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terampil.
	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang terampil
	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mandiri
	Jumlah Panti Sosial yang terakreditasi
	Jumlah Daerah yang mendapat jaminan, perlindungan dan bantuan sosial

- 2) Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Jumlah PSKS yang terampil dan profesional

### c. Program

Untuk mewujudkan sasaran strategik maka ditetapkan berbagai program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dimana program-program tersebut mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021. Berbagai program dalam RPJMD dimaksud yang disesuaikan dengan penganggaran Dinas Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

#### 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Merupakan salah satu pelayanan administrasi perkantoran untuk menunjang capaian dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

#### 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk meningkatkan pengembangan dalam mendukung program pemerintahan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan SKPD khususnya.

#### 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dalam peningkatan disiplin aparatur diberikan pakaian dinas beserta perlengkapannya guna menunjang kinerja aparatur untuk lebih baik kedepannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara.

#### 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Perlunya diadakan bimbingan dan pengetahuan tentang peraturan dalam peningkatan sumber daya aparatur guna meningkatkan SDM aparatur yang berkompetensi.

#### 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Penyusunan pelaporan capaian kinerja untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam perencanaan dan penganggaran SKPD dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja serta diberikan apresiasi terhadap penatausahaan keuangan SKPD.

**6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

Kehadiran penyandang disabilitas merupakan bagian dari keseluruhan komunitas masyarakat yang memerlukan perhatian dari seluruh elemen terkait di dalamnya. Kehadiran Penyandang disabilitas dalam suatu keluarga dan lingkungan sosial secara sosiologis terkadang menimbulkan masalah yang mengakibatkan ketidak berfungsian sosial keluarga dan lingkungan serta perlakuan salah terhadap penyandang disabilitas sehingga memerlukan penanganan serta pelayanan yang terpadu, terarah, berkesinambungan serta profesionalisme.

**7) Program Pembinaan Anak Terlantar**

Kegiatan pembinaan atau rehabilitasi anak terlantar dilaksanakan melalui penyelenggaran panti pemerintah yang berada dibawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yaitu UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang dan UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung yang melakukan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat dimana dalam memberikan kegiatan berupa penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuh keluarga dan pelatihan keterampilan serta bimbingan jasmani dan rohani.

**8) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma**

Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat yang diarahkan untuk membantu penyandang cacat melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat yang juga melalui panti pemerintah dibawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yakni UPTD. PSBN Tuah Sakato dan UPTD. PSBGHI Kalumbuk Padang dalam program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat.

9) **Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**

Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo terdiri dari 2 (dua) sasaran program yaitu Pelayanan Sosial Asuhan Anak dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia (jompo) dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak asuh dan lanjut usia juga diberikan bimbingan dan pendidikan pelatihan keterampilan, jasmani, rohani serta kesehatan terhadap klien yang selalu dijaga selama dalam pembinaan

10) **Program Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)**

Program pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial yang terdiri dari eks narapidana, eks narkoba dan eks penyandang penyakit sosial lainnya. Pada Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial merupakan salah satu kegiatan pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan terhadap eks wanita tuna susila dan eks penyalahgunaan narkoba.

11) **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

Kelembagaan sosial masyarakat, dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu komponen penting disamping pemerintah dan dunia usaha. Kelembagaan sosial masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai agen sosialisasi perubahan terencana yang tumbuh dari masyarakat dan atau diprakarsai oleh pemerintah.

12) **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**

Program Pemberdayaan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

#### **d. Perjanjian Kinerja**

---

Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama setahun sebagai berikut :

Tabel 2.1 PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
2	3	4	7	8
<b>Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>	a. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri :		<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>142.813.060</b>
	- Panti Pemerintah	925	1 Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	95.110.460
	- Panti Swasta	4000	2 Penyusunan Peraturan Gubernur dan Sosialisasi Perda Disabilitas	47.702.600
			<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	<b>7.470.982.450</b>
			1 Pengadaan Kelengkapan (Biaya Klien);	852.065.000
			2 Seleksi Penerimaan Calon Kelayan;	60.940.000
			3 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);	582.229.500
			4 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang);	800.816.800

			5	Pengadaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;	24.708.000
			6	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung);	204.920.000
			7	Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak;	158.824.950
			8	Pengadaan Makanan dan Minuman Kelayan;	3.237.621.333
			9	Sehari Bersama Anak;	26.528.700
			10	Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	40.018.900
				<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma</b>	<b>3.073.104.400</b>
			1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma;	541.293.100
			2	Biaya Makan dan Minum Kelayan;	1.461.096.940
			3	Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;	28.660.300
			4	Biaya Kelengkapan Klien;	340.559.000
			5	Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPC);	83.675.300
			6	Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Cacat Mental);	460.718.300
			7	Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas.	17.117.400

			<b>Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</b>	<b>2.883.068.340</b>
			1 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo;	609.673.752
			2 Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo;	394.065.800
			3 Biaya Kelengkapan Klien Panti Asuhan;	196.400.000
			4 Biaya Makanan dan Minimum Klien di Panti Jompo;	1.632.612.452
			5 Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;	57.179.700
			6 Biaya Pendidikan Klien;	317.185.650
			7 Biaya Jasa Penguburan/Pemulangan Klien;	30.800.000
			8 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan;	207.552.000
			9 Biaya Makanan dan Minuman di Panti Asuhan;	1.620.251.744
			10 Penyediaan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis;	58.055.400
			11 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan;	475.918.550
			12 Bimbingan Teknis Pendampingan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia;	71.639.140
			13 Lanjut Usia Berkreasi.	27.715.000
				<b>862.381.000</b>

			<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>	
			<b>1</b> Pengadaan Kelengkapan Klien;	178.150.000
			<b>2</b> Biaya Obat-obatan;	25.990.000
			<b>3</b> Pengadaan Makanan dan Minuman;	377.468.300
			<b>4</b> Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial;	341.867.500
			<b>Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba</b>	<b>159.340.650</b>
			<b>5</b> Bimbingan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV/AIDS;	64.763.450
			<b>6</b> Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah;	58.477.500
			<b>7</b> Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan NAPZA.	36.099.700
			<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>5.986.784.971</b>
			<b>1</b> Pengadaan Beras Untuk Panti Swasta se Sumatera Barat	2.489.459.386

			<b>2</b> Bimbingan Motivasi Sosial / Keterampilan bagi keluarga Miskin (dalam rangka HARGANAS)	100.099.500
			<b>3</b> Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan	54.932.200
			<b>4</b> Sosialisasi Program Keluarga Harapan Tingkat Kecamatan	35.297.200
			<b>5</b> Pertemuan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan	53.002.200
			<b>6</b> Pelayanan Orang Terlantar	18.916.800
			<b>7</b> Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Korban Tindak Kekerasan	56.600.000
			<b>8</b> Asistensi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Korban Pekerja Migran	60.980.000
			<b>9</b> Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) PFM Perkotaan	82.831.000
			<b>10</b> Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Data PBDT	127.960.000
	b. Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terampil	30 KK	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	
			<b>1</b> Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	57.983.250
			<b>2</b> Penetapan calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	123.831.500
	c. Jumlah KUBE Fakir Miskin yang mandiri	18 Klpk	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>	

			<b>Lainnya</b>	
			1 Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE Fakir Miskin	89.832.500
			2 Seleksi Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	135.393.000
			3 Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama	531.199.750
	d. Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mandiri.	200 kk	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b> <b>Lainnya</b>	
			1 Bimbingan Keterampilan berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	1.526.159.085
	e. Jumlah Panti Sosial yang terakreditasi	15 Panti	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	
			1 Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi	62.670.000
	f. Jumlah Daerah yang terpenuhinya kebutuhan logistik	19 kab/kota	<b>Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial</b>	<b>220.326.700</b>
			1 Sosialisasi Psikososial Korban Bencana	53.962.200
			2 Rapat Koordinasi Pembentukan TRC Penanganan Bencana	53.962.200
			3 Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)	60.462.200
<b>Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan</b>	Jumlah PSKS yang terampil dan profesional	396 org	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>1.711.927.000</b>

<b>Kesejahteraan Sosial.</b>					
			1	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;	50.000.000
			2	Bimbingan bagi Pengurus Organisasi Sosial se-Sumatera Barat;	54.492.000
			3	Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi Tingkat Sumatera Barat;	97.496.000
			4	KSN Expo dan Award dalam HKSNI Tahun 2016;	32.000.000
			5	Penguatan Nilai-Nilai HKSNI;	150.000.000
			6	Penguatan Kelembagaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;	378.500.000
			7	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	186.000.000
			8	Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Sustainable Development Goals (SDGs);	310.500.000
			9	Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se Sumatera Barat dalam rangka akreditasi	62.670.000
			10	Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat	58.294.000
			11	Pertemuan Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	53.458.000
			12	Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat	256.857.000

			13	Pertemuan Forum Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat	50.000.000
			14	Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat	46.660.000
			15	Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3	127.555.500

